

## **8 PRIORITAS PEMERINTAHAN BARU MENUJU KEBANGKITAN INDONESIA RAYA**

Pemerintah Megawati telah bekerja cukup keras mengatasi krisis multi-dimensional yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satu prestasi yang akan tercatat dalam sejarah bangsa, adalah keberhasilannya melaksanakan pergantian Presiden secara demokratis, damai dan aman. Tapi, masih banyak harapan masyarakat yang belum berhasil dipenuhi oleh Pemerintah, dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari krisis multidimensi yang berkepanjangan.

Berita-berita besar di media massa tentang tindak kejahatan kerah putih, 'korupsi berjamaah' di berbagai daerah, penyelundupan besar-besaran, hutang negara yang terus membengkak, penjualan semena-mena aset Negara, ketidakadilan di bidang hukum, keamanan yang semakin rawan serta berbagai keruwetan sosial ekonomi, telah menyebabkan citra Pemerintah dan para elit politik nasional di mata rakyat semakin hari semakin merosot.

Agar cepat memperoleh kepercayaan serta dukungan dari masyarakat luas dan dapat mencari jalan keluar dari krisis multidimensi tersebut maka Pemerintah Baru harus mampu menyusun program kerja dengan prioritas yang tajam. Dengan ditetapkannya prioritas tersebut, tidaklah berarti yang tidak masuk prioritas menjadi tidak penting. Hanya mengingat kemampuan Pemerintah yang terbatas terutama jangka waktu yang hanya 5 tahun, program-program non-prioritas tersebut untuk sementara dapat dianggap cukup aman, telah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga program-programnya dapat diteruskan atau otomatis harus sudah dapat memberikan dukungan dan menyesuaikan dengan skala prioritas Pemerintah.

Ada delapan program utama yang harus menjadi prioritas Pemerintah pasca Pemilu yaitu:

### **1. Menggalang kepercayaan rakyat dan membangun harapan.**

Presiden beserta Kabinet harus bisa menggalang kepercayaan rakyat, sekaligus membangun harapan mereka atas masa depan yang lebih baik. Presiden harus dapat membangun *Dream Team* yang mampu menimbulkan citra sebagai berikut:

- 1.1. Memiliki kepemimpinan yang kuat dan berintegritas;
- 1.2. Kompak;

- 1.3. Memiliki kepedulian dan solidaritas yang tinggi terhadap persoalan dan penderitaan rakyat, senasib sepenanggungan;
- 1.4. Penuh komitmen dan mengabdikan dengan sepenuh jiwa raga, rasa dan karsa bagi bangsa, negara dan rakyatnya (mewakafkan diri dan perjuangannya);
- 1.5. Menganut dan mengembangkan pola hidup bersih dalam arti yang seluas-luasnya;
- 1.6. Menganut dan mengembangkan pola hidup sederhana;
- 1.7. Dapat memberikan contoh, keteladanan dan kepeloporan yang nyata mengenai hal-hal yang baik, khususnya butir-butir diatas, sehingga dapat mengajak rakyat untuk bersama-sama mengatasi krisis dan membangun masa depan yang gemilang.

**2. Memberantas korupsi secara sistematis dan terpola, preventif dan represif, yang dibuktikan dengan, antara lain:**

- 2.1. Menutup berbagai peluang birokrasi yang memungkinkan terjadinya korupsi – *mark up* dan *riswa*. Menciptakan transparansi dalam manajemen perijinan.
- 2.2. Menghukum para koruptor, khususnya yang berskala besar atau elite nasional, sehingga dapat memberikan *shocktherapy* dan *deterrent effect* yang positif, sekaligus menarik simpati, kepercayaan, dan dukungan rakyat.
- 2.3. Membangun dan mengembangkan mekanisme kontrol sosial yang kuat.
- 2.4. Mengembangkan budaya dan tata nilai yang mengutamakan prestasi diidil dibanding materiil.
- 2.5. Lain-lain tindakan yang memperkuat upaya tersebut antara lain *law Enforcemen* di bidang perpajakan.

**3. Memberikan jaminan rasa aman dan ketertiban serta membasmi premanisme, dengan :**

- 3.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara siskamling;
- 3.2. Membangun budaya disiplin nasional, antara lain tertib lalu lintas.

**4. Menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, yang harus dibuktikan secara cepat dan nyata sehingga dapat memberikan *shocktherapy* dan *deterrent effect* yang positif sekaligus menarik simpati, kepercayaan dan dukungan rakyat.**

- 4.1. Membangun sistem kontrol sosial masyarakat yang aktif dan partisipatif;

**5. Mengembangkan kebudayaan dan sistem pendidikan nasional yang menghasilkan insan yang berkualitas global, yang siap pakai dan berakhlak mulia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prestasi idiil, antara lain :**

- 5.1. Menjadikan pendidikan prioritas dalam anggaran;
- 5.2. Membangun kepedulian dan dukungan masyarakat.

**6. Membuka lapangan kerja sekaligus memperkokoh sector ekonomi riil dan mengembangkan wawasan nusantara, antara lain dengan:**

- 6.1 Memperbaiki dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi khususnya yang bersifat vital, strategis dan padat karya. Misalkan prasarana jalan raya, kereta api, lalu lintas antar pulau - sungai dan danau (dimulai dari yang paling sederhana, yaitu Gerakan Nasional "Jernih Sungai dan Danauku").
- 6.2 Mendorong investasi untuk industri-industri dasar dan pengolahan yang berbasis bahan baku dalam negeri, industri kebutuhan pokok, industri substitusi impor dan pengembangan armada nusantara (darat, laut, sungai dan danau).
- 6.3 Mengembangkan kepariwisataan secara terpadu dengan pemerataan pembangunan, otonomi daerah, potensi *local genius* dan budaya, pelestarian lingkungan, cinta tanah air dan pengembangan wawasan nusantara.
- 6.4 Mengembangkan semua kegiatan ekonomi yang berdasarkan efisiensi, keberlanjutan dan kemandirian.

**7. Membangun sistem nasional untuk meningkatkan ketahanan, efisiensi dan kedisiplinan yang berkepribadian nasional.**

- 7.1 Melancarkan Gerakan Pola Hidup Sederhana dengan melakukan penghematan-penghematan besar dan mengendalikan pola hidup konsumtif secara kongkrit serta menghentikan kebocoran dan pemborosan anggaran. Dimulai dari yang paling sederhana, misalkan penyederhanaan kendaraan dinas.
- 7.2 Meningkatkan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
- 7.3 Meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan dalam arti luas.
- 7.4 Meningkatkan penerimaan dalam negeri antara lain ekstensifikasi perpajakan secara adil.
- 7.5 Mengembangkan Otonomi Daerah secara bertanggung jawab.

**8. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, seperti bidang kesehatan, pendidikan, angkutan umum, transparansi serta kepastian waktu dan biaya pengurusan aneka perijinan, dan lain-lain.**

- 8.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk rakyat dengan memproduksi obat murah, rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Puskesmas, serta Rumah Sakit Umum Daerah.
- 8.2. Mendorong investasi dengan memperbaiki peraturan, pelayanan dan kepastian usaha

## **19 POSISI KUNCI**

Untuk bisa mensukseskan kedelapan program prioritas tersebut, paling sedikit ada 19 posisi kunci yang harus dipegang oleh tokoh-tokoh pekerja keras (bukan sekedar pengamat) dan bukan demi akomodasi politis, yang secara teguh menganut pola hidup bersih, sederhana dan mengabdikan untuk:

- 1. Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 2. Jaksa Agung
- 3. Menteri Kehakiman dan Penegakan HAM
- 4. KAPOLRI
- 5. Panglima TNI
- 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah
- 7. Menteri Keuangan
- 8. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan
- 9. Menteri Kesehatan
- 10. Menteri Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 11. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- 12. Menteri Pertanian dan Perkebunan
- 13. Menteri Perikanan dan Industri Maritim
- 14. Menteri Perhubungan dan Pariwisata
- 15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- 16. Menteri Informasi dan Komunikasi Pembangunan
- 17. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
- 18. Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet
- 19. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **USULAN PERSONALIA**

- 1. Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 2. Jaksa Agung:
- 3. Menteri Kehakiman dan Penegakan HAM: *Prof. Dr. Mahfudz MD*
- 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah

5. Menteri Keuangan: *Dr. Budiono*
6. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan
7. Menteri Kesehatan:
8. Menteri Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
9. Menteri Perindustrian dan Perdagangan:
10. Menteri Pertanian dan Perkebunan:
11. Menteri Perikanan dan Industri Maritim:
12. Menteri Perhubungan dan Pariwisata:
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: *Prof. Miftah Thoha*
14. Menteri Informasi dan Komunikasi Pembangunan
15. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah: *(Mayjen Purn) Mardianto*
16. Menteri Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet: *Mayjen Sudi Silalahi*
17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Dr. Rizal Ramli*
18. Panglima TNI
19. KAPOLRI

Semoga Allah Yang Memiliki Segala Kekuasaan dan Kemuliaa menolong serta memberkahi perjuangan kita. Amin.

**Jakarta, 20 September 2004**